



SALINAN

BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

---

PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG  
TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk merealisasikan sumber pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2021, telah disusun target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Bupati Bogor Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

11. Peraturan...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 28);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 30);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 7);

20. Peraturan...

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 88);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 8);
23. Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 98);
24. Peraturan Bupati Bogor Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 16);
25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

Ketentuan...

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 1 April 2021  
BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 1 April 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2021 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR : 26 TAHUN 2021  
TANGGAL : 1 APRIL 2021

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN  
SETELAH PERUBAHAN PARSIAL I APBD TAHUN ANGGARAN 2021

| NO |    | URAIAN PENERIMAAN                                             | TARGET AWAL 2021<br>(Rp) | TARGET SETELAH<br>PERUBAHAN 2021<br>(Rp) | TARGET S.D<br>TRIWULAN I |       | TARGET S.D<br>TRIWULAN II |       | TARGET S.D<br>TRIWULAN III |       | TARGET S.D<br>TRIWULAN IV |     |
|----|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|---------------------------|-----|
|    |    |                                                               |                          |                                          | JUMLAH (Rp)              | %     | JUMLAH (Rp)               | %     | JUMLAH (Rp)                | %     | JUMLAH (Rp)               | %   |
| I  |    | PAJAK DAERAH                                                  | 1.832.504.463.000        | 1.882.504.463.000                        | 500.000.000.000          | 26,56 | 937.668.695.163           | 49,81 | 1.479.574.544.676          | 78,60 | 1.882.504.463.000         | 100 |
|    | 1  | Pajak Hotel                                                   | 89.942.516.000           | 89.942.516.000                           | 17.473.588.625           | 19,43 | 32.437.643.918            | 36,06 | 61.101.699.211             | 67,93 | 89.942.516.000            | 100 |
|    | 2  | Pajak Restoran dan<br>Sejenisnya                              | 154.856.185.000          | 154.856.185.000                          | 33.417.891.415           | 21,58 | 64.676.967.885            | 41,77 | 109.686.044.355            | 70,83 | 154.856.185.000           | 100 |
|    | 3  | Pajak Hiburan                                                 | 68.300.000.000           | 68.300.000.000                           | 4.445.433.930            | 6,51  | 14.093.407.690            | 20,63 | 37.202.427.210             | 54,47 | 68.300.000.000            | 100 |
|    | 4  | Pajak Reklame                                                 | 15.289.312.000           | 15.289.312.000                           | 4.892.635.577            | 32,00 | 7.458.672.120             | 48,78 | 11.828.901.040             | 77,37 | 15.289.312.000            | 100 |
|    | 5  | Pajak Penerangan Jalan                                        | 267.961.331.000          | 267.961.331.000                          | 68.388.399.300           | 25,52 | 132.409.403.440           | 49,41 | 202.466.407.580            | 75,56 | 267.961.331.000           | 100 |
|    | 6  | Pajak Parkir                                                  | 10.212.000.000           | 10.212.000.000                           | 2.208.404.965            | 21,63 | 4.077.304.885             | 39,93 | 6.746.204.805              | 66,06 | 10.212.000.000            | 100 |
|    | 7  | Pajak Air Tanah                                               | 63.747.447.000           | 63.747.447.000                           | 14.750.000.000           | 23,14 | 29.812.654.835            | 46,77 | 48.375.309.670             | 75,89 | 63.747.447.000            | 100 |
|    | 8  | Pajak Mineral Bukan<br>Logam dan Batuan                       | 125.150.000.000          | 125.150.000.000                          | 25.100.000.000           | 20,06 | 52.837.155.410            | 42,22 | 87.054.310.820             | 69,56 | 125.150.000.000           | 100 |
|    | 9  | Pajak Bumi dan<br>Bangunan Perdesaan dan<br>Perkotaan (PBBP2) | 490.640.264.000          | 510.640.264.000                          | 159.323.646.188          | 31,20 | 319.323.646.188           | 62,53 | 495.579.751.788            | 97,05 | 510.640.264.000           | 100 |
|    | 10 | Bea Perolehan Hak Atas<br>Tanah dan Bangunan<br>(BPHTB)       | 546.405.408.000          | 576.405.408.000                          | 170.000.000.000          | 29,49 | 280.541.838.792           | 48,67 | 419.533.488.197            | 72,78 | 576.405.408.000           | 100 |

II. RETRIBUSI...

|    |   |                                                |                 |                 |                |       |                |       |                |       |                 |     |
|----|---|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|-----------------|-----|
| II |   | RETRIBUSI DAERAH                               | 139.450.234.984 | 143.696.856.424 | 23.582.437.074 | 16,41 | 53.898.829.299 | 37,51 | 99.940.866.330 | 69,55 | 143.696.856.424 | 100 |
|    |   | A. Retribusi Jasa Umum                         | 33.840.464.334  | 33.840.464.334  | 6.056.808.858  | 17,90 | 13.183.040.538 | 38,96 | 21.792.307.136 | 64,40 | 33.840.464.334  | 100 |
|    | 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas     | 6.440.411.234   | 6.440.411.234   | 1.610.102.808  | 25,00 | 3.220.205.616  | 50,00 | 4.830.308.424  | 75,00 | 6.440.411.234   | 100 |
|    | 2 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan    | 19.963.902.000  | 19.963.902.000  | 2.994.585.300  | 15,00 | 6.987.365.700  | 35,00 | 12.377.619.240 | 62,00 | 19.963.902.000  | 100 |
|    | 3 | Retribusi Pelayanan Pemakaman/ Pengabuan Mayat | 108.399.000     | 108.399.000     | 27.099.750     | 25,00 | 54.199.500     | 50,00 | 81.299.250     | 75,00 | 108.399.000     | 100 |
|    | 4 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum  | 266.742.000     | 266.742.000     | 66.675.000     | 25,00 | 133.350.000    | 49,99 | 200.025.000    | 74,99 | 266.742.000     | 100 |
|    | 5 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor         | 2.460.590.100   | 2.460.590.100   | 614.996.000    | 24,99 | 1.229.877.500  | 49,98 | 1.844.758.000  | 74,97 | 2.460.590.100   | 100 |
|    | 6 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 759.600.000     | 759.600.000     | 152.350.000    | 20,06 | 330.820.000    | 43,55 | 534.075.000    | 70,31 | 759.600.000     | 100 |
|    | 7 | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang            | 2.500.000.000   | 2.500.000.000   | 591.000.000    | 23,64 | 1.227.222.222  | 49,09 | 1.924.222.222  | 76,97 | 2.500.000.000   | 100 |
|    | 8 | Retribusi Menara Telekomunikasi                | 1.340.820.000   | 1.340.820.000   | -              | -     | -              | -     | -              | -     | 1.340.820.000   | 100 |

B Retribusi...

|  |                         |                                                       |               |                |               |       |               |       |               |       |                |     |
|--|-------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|----------------|-----|
|  | B. Retribusi Jasa Usaha |                                                       | 6.991.525.650 | 11.238.147.090 | 2.493.988.216 | 22,19 | 5.048.490.761 | 44,92 | 8.030.786.194 | 71,46 | 11.238.147.090 | 100 |
|  | 1                       | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah                   | 6.080.990.650 | 10.327.612.090 | 2.281.644.216 | 22,09 | 4.601.981.761 | 44,56 | 7.354.937.194 | 71,22 | 10.327.612.090 | 100 |
|  |                         | a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) | 2.632.848.000 | 2.632.848.000  | 658.212.000   | 25,00 | 1.316.424.000 | 50,00 | 1.974.636.000 | 75,00 | 2.632.848.000  | 100 |
|  |                         | b. Dinas Perikanan dan Peternakan (DISKANAK)          | 100.025.000   | 100.025.000    | -             | -     | 50.012.500    | 50,00 | 50.012.500    | 50,00 | 100.025.000    | 100 |
|  |                         | c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)    | -             | 4.246.621.440  | 944.422.046   | 22,24 | 1.768.206.914 | 41,64 | 2.900.866.036 | 68,31 | 4.246.621.440  | 100 |
|  |                         | d. Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA)                | 3.030.206.250 | 3.030.206.250  | 618.702.700   | 20,42 | 1.336.358.850 | 44,10 | 2.200.526.450 | 72,62 | 3.030.206.250  | 100 |
|  |                         | e. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)                       | 317.911.400   | 317.911.400    | 60.307.470    | 18,97 | 130.979.497   | 41,20 | 228.896.208   | 72,00 | 317.911.400    | 100 |
|  | 2                       | Retribusi Terminal                                    | 362.880.000   | 362.880.000    | 88.704.000    | 24,44 | 179.424.000   | 49,44 | 270.144.000   | 74,44 | 362.880.000    | 100 |
|  | 3                       | Retribusi Rumah Potong Hewan                          | 540.155.000   | 540.155.000    | 122.540.000   | 22,69 | 264.485.000   | 48,96 | 400.805.000   | 74,20 | 540.155.000    | 100 |
|  | 4                       | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga      | 7.500.000     | 7.500.000      | 1.100.000     | 14,67 | 2.600.000     | 34,67 | 4.900.000     | 65,33 | 7.500.000      | 100 |

C. Retribusi...

|                            |                                      |                                                               |                   |                   |                 |       |                 |       |                   |       |                   |     |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-----|
|                            | C. Retribusi Jasa Perizinan Tertentu |                                                               | 98.618.245.000    | 98.618.245.000    | 15.031.640.000  | 15,24 | 35.667.298.000  | 36,17 | 70.117.773.000    | 71,10 | 98.618.245.000    | 100 |
|                            | 1                                    | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan                            | 92.000.000.000    | 92.000.000.000    | 13.800.000.000  | 15,00 | 32.200.000.000  | 35,00 | 64.400.000.000    | 70,00 | 92.000.000.000    | 100 |
|                            | 2                                    | Retribusi Izin Trayek                                         | 168.245.000       | 168.245.000       | 31.640.000      | 18,81 | 67.298.000      | 40,00 | 117.773.000       | 70,00 | 168.245.000       | 100 |
|                            | 3                                    | Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing | 6.450.000.000     | 6.450.000.000     | 1.200.000.000   | 18,60 | 3.400.000.000   | 52,71 | 5.600.000.000     | 86,82 | 6.450.000.000     | 100 |
| JUMLAH PAJAK DAN RETRIBUSI |                                      |                                                               | 1.971.954.697.984 | 2.026.201.319.424 | 523.582.437.074 | 25,84 | 991.567.524.462 | 48,94 | 1.579.515.411.006 | 77,95 | 2.026.201.319.424 | 100 |

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN